



LAPORAN TAHUNAN 2024

PPID DISKOMINFO KABUPATEN SEMARANG



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 dapat disusun sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tahunan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik bagi PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 10 Januari 2025

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Semarang**

selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



PETRUS TRIYONO, S.Sos., M.Si.

NIP. 197204231992031005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
I PENDAHULUAN.....	1
II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK DISKOMINFO KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024.....	3
III PROGRAM DAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024.....	5
IV MEKANISME UMPAN BALIK DAN PENGADUAN PUBLIK.....	25
V TANTANGAN DAN REKOMENDASI.....	28
VI PENUTUP.....	32

Pendahuluan

A. Latar Belakang dan Tujuan Laporan

Laporan tahunan ini kami susun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia layanan publik sepanjang tahun 2024. Dokumen ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat luas dan para pemangku kepentingan. Lebih dari itu, laporan ini berfungsi sebagai landasan penting untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan di masa depan. Keinginan untuk menyajikan laporan yang "lengkap" ini mencerminkan kebutuhan internal kami untuk meninjau detail kinerja, mengidentifikasi celah yang ada, dan menyiapkan dasar untuk perencanaan strategis serta alokasi sumber daya di kemudian hari.

Kami meyakini bahwa pelayanan publik yang efektif dan transparan adalah pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Diskominfo Kabupaten Semarang, sebagai ujung tombak di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, memiliki peran sentral dalam memastikan akses informasi bagi publik, kelancaran sistem pemerintahan elektronik, pemanfaatan data sektoral yang optimal, dan terjaganya keamanan informasi. Laporan ini akan mengulas upaya-upaya yang telah kami lakukan, capaian yang berhasil diraih, serta berbagai tantangan yang kami hadapi dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.



B. Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo Kabupaten Semarang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang memegang peranan strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Tugas pokok dan fungsi Dinas ini meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di ketiga bidang tersebut. Pembagian tugas ini memungkinkan Diskominfo untuk berfokus pada pilar-pilar penting dalam pembangunan digital dan keterbukaan informasi.

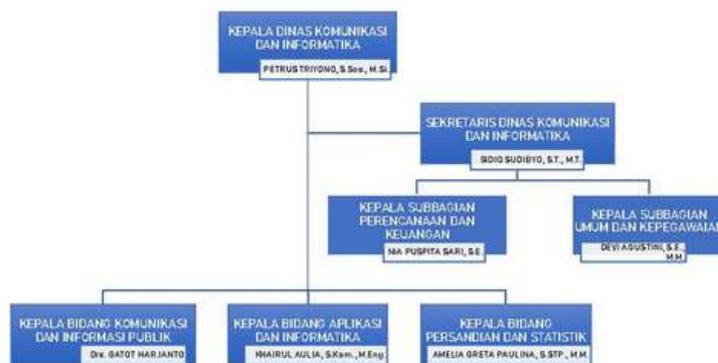
Secara lebih terperinci, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Ini mencakup perumusan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan kegiatan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidangnya. Fungsi ini juga meliputi penyelenggaraan Layanan Publikasi Kehumasan, fasilitasi pelayanan advokasi penanganan kasus hubungan eksternal, serta penyediaan layanan informasi dan komunikasi publik yang menjadi cakupan kerjanya. Peran Bidang ini sungguh vital dalam memastikan informasi pemerintah sampai kepada masyarakat secara efektif dan akurat.

Adapun Sekretariat Dinas memiliki tanggung jawab yang luas dalam mendukung seluruh operasional Dinas. Tugasnya mencakup penyusunan program kerja dan anggaran, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas secara keseluruhan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan. Peran Sekretariat dalam mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban ini menunjukkan bahwa permintaan laporan tahunan ini sangat selaras dengan tanggung jawab inti Sekretariat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi kinerja Dinas.

Gambaran Umum Pelayanan Publik Diskominfo Kabupaten Semarang Tahun 2024

A. Struktur Organisasi dan Bidang Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dirancang dengan struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik. Struktur ini memungkinkan pembagian tugas yang jelas ke dalam bidang-bidang spesifik, yakni Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Aplikasi dan Informatika, dan Bidang Persandian dan Statistik. Masing-masing bidang ini beroperasi dengan tugas dan fungsi yang saling melengkapi untuk mendukung pelayanan publik yang komprehensif.



Gambar 1 Struktur Organisasi

Setiap bidang memiliki fokus pelayanan yang unik, mulai dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government), penyediaan data statistik yang akurat, hingga pengamanan informasi dan persandian. Penggabungan fungsi persandian (keamanan siber) dan statistik (manajemen data) bersama dengan komunikasi publik dan aplikasi informatika dalam satu Dinas menunjukkan adanya pendekatan yang terpadu terhadap tata kelola digital dan informasi publik. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa pelayanan publik modern sangat bergantung pada integritas data, keamanan sistem, dan infrastruktur digital yang handal, bukan hanya pada komunikasi eksternal semata. Pendekatan holistik ini menjadi landasan bagi Diskominfo dalam memberikan pelayanan yang relevan dan terpercaya di era digital.

B. Kebijakan dan Prioritas Pelayanan Publik Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Kabupaten Semarang Tahun 2024 disusun dengan tujuan utama untuk mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Prioritas utama yang ditetapkan adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penekanan pada SPBE ini menunjukkan komitmen kuat Diskominfo untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi.

Tujuan strategis lainnya yang menjadi fokus Diskominfo di tahun 2024 meliputi peningkatan keterbukaan informasi publik, peningkatan pemanfaatan data statistik sektoral, dan peningkatan pengamanan informasi pemerintah daerah. Tujuan-tujuan ini saling terkait dan membentuk kerangka kerja yang solid untuk pelayanan publik berbasis digital.

Program unggulan Bupati Semarang yang secara aktif didukung oleh Diskominfo mencerminkan arah kebijakan yang berorientasi pada masyarakat dan digitalisasi. Program-program ini termasuk reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan *electronic government* dengan tujuan mewujudkan *good governance*, penyediaan jaringan internet desa/kelurahan, serta pengembangan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat seperti "Lapor Bupati". Fokus pada SPBE, akses internet di desa, dan sistem pengaduan daring menunjukkan adanya dorongan kebijakan yang kuat menuju transformasi digital dan layanan yang berpusat pada warga. Ini menegaskan bahwa Diskominfo memandang teknologi sebagai pendorong utama dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik.

Program dan Kegiatan Pelayanan Publik Tahun 2024

Bagian ini akan menguraikan secara rinci pelaksanaan dan hasil dari program-program pelayanan publik yang telah direncanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang sepanjang tahun 2024

Program / Kegiatan Utama	Tujuan	Indikator Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatkan keterbukaan informasi publik		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		5 jenis layanan	1.300.540.800,00
Pengelolaan Media Komunikasi Publik		12 dokumen	775.983.200,00
Pelayanan Informasi Publik		2 dokumen Daftar Informasi Publik (DIP)	272.096.400,00
Layanan Hubungan Media		1 layanan siaran radio	131.861.700,00
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		120 orang SDM	16.284.000,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		2 dokumen kemitraan	104.315.500,00

Program / Kegiatan Utama	Tujuan	Indikator Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)
Program Aplikasi Informatika	Meningkatkan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain		77 titik infrastruktur jaringan	296.651.350,00
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		1 unit sistem jaringan	296.651.350,00
Pengelolaan E-government		5 kegiatan pendukung	1.383.566.550,00
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		1 unit pusat data	125.975.300,00
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		1 unit aplikasi/proses bisnis	53.691.000,00
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas		1 dokumen program inovasi	49.143.250,00

Program / Kegiatan Utama	Tujuan	Indikator Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		5 dokumen implementasi	1.154.757.000,00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral dan kemudahan akses data		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral		8 dokumen buku statistik	239.336.900,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		4 dokumen data/informasi/statistik	186.058.900,00
Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi		46 orang peningkatan kapasitas SDM	18.650.000,00
Membangun Metadata Statistik Sektoral		1 dokumen aplikasi sistem data	34.628.000,00

Program / Kegiatan Utama	Tujuan	Indikator Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatkan pengamanan informasi pemerintah daerah		
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		46 OPD difasilitasi layanan persandian	144.500.000,00
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		46 unit perangkat daerah difasilitasi	144.500.000,00
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah		46 OPD tergabung dalam forum	26.275.000,00
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah		46 unit perangkat daerah terhubung	26.275.000,00

Tabel 1: Ringkasan Program dan Target Pelayanan Publik Diskominfo Kabupaten Semarang Tahun 2024

Sumber: Renja Diskominfo Kabupaten Semarang Tahun 2024

A. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini secara fundamental bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik.

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Target yang kami tetapkan untuk tahun 2024 adalah mengelola 5 jenis layanan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah. Meskipun data spesifik mengenai realisasi jumlah layanan ini tidak tersedia secara eksplisit dalam sumber informasi yang ada, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024 menunjukkan realisasi anggaran yang tinggi untuk sub-kegiatan terkait, yaitu "Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas," yang mencapai 98,56% dari alokasi anggaran. Tingginya realisasi anggaran ini mengindikasikan adanya aktivitas yang signifikan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Sebagai bagian dari upaya pengelolaan komunikasi publik, Diskominfo Kabupaten Semarang aktif mendukung berbagai inisiatif relevan. Sebagai contoh, Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) di Kabupaten Semarang pada 7 Maret 2024 didorong untuk memperluas jejaring dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Kegiatan ini menunjukkan komitmen kami untuk memanfaatkan berbagai saluran, termasuk media tradisional, dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Meskipun beberapa informasi terkait digitalisasi arsip dan simulasi Data Center berasal dari Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, komitmen Provinsi terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan digitalisasi arsip (11 Januari 2024) secara tidak langsung mendukung upaya pengelolaan informasi di tingkat Kabupaten, karena menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengelolaan informasi yang lebih baik.

2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Target tahun 2024 untuk kegiatan ini adalah produksi 12 dokumen media komunikasi publik. Realisasi anggaran untuk sub-kegiatan ini mencapai 96,88% dari pagu indikatif Rp 775.983.200,00, dengan realisasi sebesar Rp 751.782.900,00. Tingginya persentase realisasi anggaran ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk pengelolaan media komunikasi publik telah dimanfaatkan secara ekstensif. Namun, tidak ditemukan berita spesifik dari Diskominfo Kabupaten Semarang yang merinci jumlah dokumen media komunikasi publik yang telah diproduksi pada tahun 2024 dalam sumber informasi yang tersedia. Kunjungan studi tiru Diskominfo Kota Semarang dari Diskominfo Kabupaten Karanganyar terkait Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) pada 8 November 2024 menunjukkan adanya pertukaran praktik terbaik di tingkat regional dalam pengelolaan media komunikasi publik, meskipun ini bukan kegiatan langsung yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Semarang. Kesenjangan antara realisasi anggaran yang tinggi dan ketiadaan data spesifik mengenai jumlah dokumen yang dihasilkan dapat mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan dalam pelaporan hasil kinerja yang lebih terperinci dan terukur.

3. Pelayanan Informasi Publik

Diskominfo Kabupaten Semarang menargetkan penyampaian 2 dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) pada tahun 2024. Realisasi anggaran untuk sub-kegiatan "Layanan Hubungan Media," yang memiliki keterkaitan erat dengan pelayanan informasi publik, mencapai 96,88% dari target anggaran Rp 130.607.200,00, dengan realisasi Rp 126.535.651,00. Dalam mendukung pelayanan informasi publik yang akurat dan terpercaya, Diskominfo Kabupaten Semarang, sebagai Walidata, telah melaksanakan Desk Rekomendasi Statistik 2024 dan Metadata Statistik 2023 pada tanggal 23-25 Januari 2024. Kegiatan ini melibatkan 31 Perangkat Daerah sebagai

Produsen Data dan bertujuan untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik serta menyusun metadatabase statistik sektoral yang handal dan efisien. Upaya ini merupakan langkah fundamental dalam memastikan kualitas data yang menjadi dasar bagi informasi publik. Meskipun kegiatan ini tidak secara langsung dihitung sebagai penyampaian dokumen DIP, ini merupakan investasi strategis dalam infrastruktur data yang mendasari semua layanan informasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa fokus tidak hanya pada penyampaian informasi, tetapi juga pada keandalan dan keakuratan informasi yang disajikan kepada publik.

4. Layanan Hubungan Media

Target untuk layanan hubungan media pada tahun 2024 adalah 1 layanan siaran radio untuk informasi publik. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini mencapai 96,88%. Meskipun targetnya adalah satu layanan, tingginya persentase realisasi anggaran menunjukkan bahwa layanan ini kemungkinan besar merupakan inisiatif yang signifikan dan berkelanjutan, seperti program siaran radio periodik, bukan hanya acara tunggal. Tidak ada berita spesifik yang merinci realisasi jumlah siaran radio dalam sumber informasi yang tersedia. Namun, komitmen anggaran yang tinggi untuk satu layanan mengindikasikan prioritas pada kualitas atau dampak dari siaran tersebut, yang dapat mencapai khalayak luas dan memberikan informasi penting kepada masyarakat.

5. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Pada tahun 2024, Diskominfo Kabupaten Semarang menargetkan peningkatan kapasitas bagi 120 orang Sumber Daya Manusia (SDM) komunikasi publik. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini mencapai 96,91%. Tidak ada berita spesifik dari Diskominfo Kabupaten Semarang yang merinci pelaksanaan pelatihan atau kegiatan peningkatan kapasitas SDM komunikasi publik pada tahun 2024 dalam sumber informasi yang

diberikan. Namun, tingginya realisasi anggaran menunjukkan bahwa investasi yang signifikan telah dilakukan untuk pengembangan kapasitas SDM. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas ini kemungkinan besar telah dilaksanakan secara internal, meskipun tidak dipublikasikan secara luas. Peningkatan kapasitas SDM adalah investasi krusial yang secara langsung berkontribusi pada kualitas pelayanan publik di masa depan.

6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Target untuk kegiatan ini pada tahun 2024 adalah menghasilkan 2 dokumen kemitraan dengan komunitas, media, dan masyarakat dalam diseminasi informasi program atau kebijakan. Realisasi anggaran untuk sub-kegiatan ini mencapai 98,56%. Lebih lanjut, capaian realisasi tahun 2024 untuk akses informasi, aduan, dan diseminasi informasi ditetapkan sebesar 100%. Ini mencakup penanganan 352 aduan, yang terdiri dari 193 aduan melalui Lapor Gubernur, 118 aduan melalui Lapor Bupati, dan 41 aduan melalui SP4N Lapor. Capaian 100% dalam aksesibilitas informasi dan penanganan 352 aduan menunjukkan efektivitas yang luar biasa dalam keterlibatan publik dan responsivitas pemerintah. Angka-angka ini secara langsung terkait dengan mekanisme umpan balik seperti "Lapor Bupati" dan SP4N-LAPOR!, menunjukkan bahwa saluran-saluran ini aktif digunakan oleh masyarakat dan dikelola secara efektif oleh Diskominfo. Kegiatan seperti dorongan untuk memperluas jejaring Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) di Kabupaten Semarang pada 7 Maret 2024 juga menunjukkan upaya aktif dalam membangun kemitraan untuk diseminasi informasi. Tingginya realisasi anggaran dan data konkret mengenai penanganan aduan menegaskan bahwa Diskominfo tidak hanya merencanakan, tetapi juga secara aktif melaksanakan strategi hubungan masyarakat dan kemitraan komunitas, terutama dalam manajemen umpan balik publik.

B. Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika bertujuan untuk meningkatkan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain

Target untuk tahun 2024 adalah memastikan 77 titik infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah terhubung dengan baik. Data spesifik mengenai realisasi target ini tidak tersedia dalam sumber informasi yang diberikan. Namun, target yang ambisius ini menunjukkan fokus pada perluasan dan optimalisasi infrastruktur jaringan internal pemerintah, yang merupakan fondasi esensial bagi setiap inisiatif e-government. Meskipun tidak ada data realisasi langsung, keberhasilan dalam mencapai target ini akan secara signifikan meningkatkan efisiensi internal pemerintah dan mendukung tulang punggung layanan publik elektronik.

2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Target tahun 2024 adalah penyelenggaraan 1 unit sistem jaringan intra pemerintah daerah. Data realisasi spesifik untuk target ini juga tidak tersedia dalam sumber informasi yang ada. Penyelenggaraan satu unit sistem jaringan intra pemerintah daerah kemungkinan besar merujuk pada pembentukan atau peningkatan signifikan dari seluruh sistem jaringan internal yang mendukung operasional pemerintah. Implementasi yang berhasil dari sistem ini merupakan prasyarat mutlak untuk SPBE yang kuat dan terintegrasi. Meskipun data capaian langsung tidak ada, keberadaan target ini dalam rencana kerja menggarisbawahi pentingnya infrastruktur digital sebagai tulang punggung layanan pemerintah.

3. Pengelolaan E-government

Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah pelaksanaan 5 kegiatan pendukung pengelolaan e-government di pemerintah daerah. Secara keseluruhan, Program Aplikasi Informatika menunjukkan realisasi anggaran yang tinggi, mencapai 94,86% dari pagu indikatif Rp 1.747.643.700,00, dengan realisasi Rp 1.658.855.935,00. Ini menunjukkan komitmen anggaran yang kuat untuk mendukung inisiatif e-government. Beberapa aktivitas terkait dari tingkat provinsi juga memberikan konteks yang relevan. Diskominfo Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program Internet Desa Tahun 2024, dengan target 215 desa terkoneksi internet (24 Januari 2024). Meskipun ini adalah inisiatif provinsi, perluasan internet desa sangat mendukung pengelolaan e-government di tingkat kabupaten, karena meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat pedesaan. Selain itu, Diskominfo Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah didorong untuk masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna akselerasi pemerintahan digital (31 Januari 2024), yang menunjukkan upaya koordinasi untuk mempercepat SPBE di seluruh daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menerima penghargaan Digital Government Award pada 29 Mei 2024, yang mencerminkan kemajuan SPBE di tingkat provinsi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan SPBE di kabupaten. Fokus pada "Perluasan penetrasi pelayanan elektronik (e-government) melalui aplikasi e-office desa" dan "Perluasan jaringan internet melalui program internet desa serta perluasan jaringan seluler" sebagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik menunjukkan arah strategis yang jelas. Ini berarti Diskominfo Kabupaten Semarang secara aktif berupaya membawa layanan digital lebih dekat kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang merupakan langkah signifikan menuju tata kelola digital yang inklusif.

4. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Target tahun 2024 adalah pengelolaan 1 unit pusat data pemerintah daerah. Data realisasi spesifik untuk target ini tidak tersedia dalam sumber informasi yang ada. Namun, kegiatan di tingkat provinsi memberikan gambaran mengenai pentingnya pengelolaan pusat data yang handal. Diskominfo Provinsi Jawa Tengah secara aktif menyiapkan simulasi Disaster Recovery Planning (DRP) Data Center pada 17 Januari 2024 dan 1 Februari 2024. Fokus pada pengelolaan satu unit pusat data mengindikasikan upaya untuk membangun atau meningkatkan pusat data yang ada agar memenuhi standar modern. Upaya provinsi dalam simulasi DRP menyoroti pentingnya ketahanan pusat data, yang menunjukkan bahwa upaya pengelolaan di Kabupaten Semarang akan selaras dengan praktik terbaik untuk memastikan SPBE yang tangguh. Keberadaan pusat data yang dikelola dengan baik adalah krusial untuk menjaga ketersediaan dan keamanan data pemerintah, yang pada gilirannya mendukung kelancaran pelayanan publik digital.

5. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Target untuk tahun 2024 adalah pengembangan 1 unit aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik. Data realisasi spesifik untuk target ini tidak tersedia dalam sumber informasi yang diberikan. Namun, kegiatan di tingkat regional menunjukkan dinamika pengembangan aplikasi SPBE. Diskominfo Kota Semarang menjadi narasumber dalam sosialisasi SPBE di Kecamatan Semarang Timur pada 11 November 2024 dan juga mengikuti pembahasan reviu dan revisi arsitektur infrastruktur dan aplikasi SPBE Nasional pada 21 Oktober 2024. Pengembangan satu unit aplikasi dan proses bisnis merupakan langkah konkret menuju peningkatan layanan publik digital. Keterlibatan Diskominfo Kota Semarang dalam diskusi dan tinjauan arsitektur SPBE di tingkat regional menunjukkan adanya lingkungan kolaboratif untuk transformasi digital. Hal ini dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan mempercepat pengembangan di Kabupaten Semarang, sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat lebih terintegrasi dan efektif dalam mendukung pelayanan publik.

6. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas

Target tahun 2024 adalah implementasi 1 dokumen program inovasi sesuai Masterplan Kota Cerdas. Data realisasi spesifik untuk target ini tidak tersedia dalam sumber informasi yang ada. Namun, Diskominfo Kota Semarang telah aktif dalam inisiatif Smart City, termasuk menghadiri evaluasi Smart City 2024 Tahap II pada 5 November 2024 dan menggelar rapat koordinasi pengisian evaluasi Smart City Tahap II pada 30 September 2024. Fokus pada Masterplan Kota Cerdas menunjukkan visi strategis jangka panjang untuk pembangunan daerah yang memanfaatkan teknologi. Meskipun aktivitas yang disebutkan berasal dari Kota Semarang, konsep "Kabupaten Cerdas" merupakan inisiatif paralel yang relevan. Proses evaluasi di Kota Semarang dapat menjadi acuan berharga bagi Kabupaten Semarang dalam merencanakan dan melaporkan implementasi program inovasi Smart Regency-nya sendiri. Ini menunjukkan upaya untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

7. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Target untuk tahun 2024 adalah menghasilkan 5 dokumen implementasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK pemerintah daerah. Data realisasi spesifik untuk target ini tidak tersedia dalam sumber informasi yang diberikan. Namun, program unggulan Bupati Semarang yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika secara langsung menunjukkan aplikasi praktis dari pengembangan sumber daya TIK. Ini termasuk penyediaan jaringan internet desa/kelurahan dan layanan "Lapor Bupati" sebagai layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Penyediaan jaringan internet desa/kelurahan dan layanan "Lapor Bupati" merupakan contoh nyata bagaimana pengembangan sumber daya TIK secara langsung berkontribusi pada pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat dimana pengelolaan TIK internal yang kuat memungkinkan peningkatan kualitas layanan eksternal kepada publik. Implementasi dokumen-dokumen ini akan menjadi landasan bagi kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam pengelolaan TIK untuk mendukung pelayanan publik.

C. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral dan kemudahan akses data statistik sektoral bagi masyarakat

Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data statistik sektoral sesuai standar	100%	100%	239.336.900	236.209.016	90.99% (Program)
	Jumlah buku statistik sektoral yang dipublikasikan	8 dokumen	8 dokumen			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data/informasi/statistik sebagai bahan perencanaan daerah	4 dokumen	4 dokumen	186.058.900	181.258.900	

Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM dengan peningkatan kapasitas	46 orang	46 orang	18.650.000	18.650.000	
Memban- gun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	34.628.000	34.628.000	

Tabel 2: Realisasi Anggaran dan Capaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024

Sumber: LKjIP Diskominfo Kabupaten Semarang 2024

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Target tahun 2024 adalah publikasi 8 dokumen buku statistik sektoral. Program ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pencapaian 100% target untuk "Persentase pengelolaan data statistik sektoral sesuai standar" dan "Jumlah buku statistik sektoral yang dipublikasikan". Selain itu, "Persentase kemanfaatan data Statistik Sektoral" mencapai 100% (3.970 dari 3.970 elemen data dimanfaatkan), dan "Persentase ketersediaan informasi Statistik Sektoral yang dapat diakses masyarakat" juga mencapai 100% (3.970 dari 3.970 item informasi tersedia). Realisasi anggaran program secara keseluruhan mencapai 90,99% dari target. Capaian yang luar biasa ini menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip "Satu Data Indonesia" di tingkat lokal. Keberhasilan dalam pengelolaan, publikasi, pemanfaatan, dan aksesibilitas data statistik mengindikasikan bahwa Diskominfo Kabupaten Semarang sangat efektif

dalam perannya sebagai Walidata. Fondasi keberhasilan ini dibangun melalui aktivitas seperti Desk Rekomendasi Statistik 2024 dan Metadata Statistik 2023 yang dilaksanakan pada 23-25 Januari 2024, bekerja sama dengan BPS Kabupaten Semarang dan Bapperida Kabupaten Semarang. Kegiatan ini melibatkan 31 Perangkat Daerah sebagai Produsen Data untuk menyusun rekomendasi statistik dan metadata, dengan tujuan menghindari duplikasi dan membangun metadatabase statistik sektoral yang andal. Rapat Koordinasi Penyusunan Juknis Metadata Statistik Sektoral juga telah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa kinerja tinggi dalam output didukung oleh pekerjaan dasar yang kuat dalam tata kelola data, memastikan kualitas dan interoperabilitas data.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Target tahun 2024 adalah penyediaan 4 dokumen data/informasi/statistik sebagai bahan perencanaan daerah. Program ini berhasil mencapai 100% target untuk jumlah dokumen data/informasi/statistik yang digunakan sebagai bahan perencanaan daerah. Pencapaian 100% dalam penyediaan data untuk perencanaan regional menunjukkan keberhasilan kolaborasi internal dan integrasi data di dalam pemerintahan Kabupaten. Hal ini secara langsung mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, yang merupakan aspek inti dari tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun Desk Koordinasi Sinkronisasi Data Statistik Sektoral yang disebutkan dalam sumber informasi berasal dari Kota Semarang (13 November 2024), kegiatan semacam ini menyoroti pentingnya koordinasi data antar-OPD, sebuah prinsip yang juga diterapkan dan berhasil dicapai di Kabupaten Semarang. Keberhasilan ini memastikan bahwa OPD lain memiliki akses terhadap data yang akurat dan terkoordinasi untuk perencanaan dan implementasi program mereka.

3. Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Target tahun 2024 adalah peningkatan kapasitas bagi 46 orang SDM. Program ini mencapai 100% target untuk jumlah SDM dengan peningkatan kapasitas. Investasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini sangat penting untuk menjaga kualitas pekerjaan statistik. Meskipun tidak

ada berita spesifik dari Diskominfo Kabupaten Semarang mengenai pelatihan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang telah menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang Tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan (mencapai 75,67, naik 0,54 poin dari tahun sebelumnya) dan Publikasi Statistik Daerah Kabupaten Semarang 2024. Publikasi-publikasi ini merupakan hasil nyata dari peningkatan mutu statistik yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM. Hal ini menunjukkan pendekatan holistik di mana investasi pada sumber daya manusia secara langsung menghasilkan data yang lebih baik dan pada akhirnya, mendukung pelayanan publik yang lebih berkualitas.

4. Membangun Metadata Statistik Sektoral

Target tahun 2024 adalah pengembangan 1 dokumen aplikasi sistem data statistik sektoral. Program ini mencapai 100% target untuk jumlah metadata statistik sektoral yang disusun. Pencapaian 100% dalam pembangunan metadata statistik sektoral merupakan keberhasilan fundamental untuk mewujudkan prinsip "Satu Data Indonesia". Metadata memastikan data mudah ditemukan, interoperabel, dan berkualitas, yang esensial untuk ekosistem data yang andal. Kegiatan seperti Desk Rekomendasi Statistik 2024 dan Metadata Statistik 2023 yang dilaksanakan pada 23-25 Januari 2024, serta Rapat Koordinasi Penyusunan Juknis Metadata Statistik Sektoral, menunjukkan komitmen Diskominfo terhadap tata kelola data yang kuat. Ini secara langsung mendukung tujuan peningkatan pemanfaatan dan aksesibilitas data, karena data yang terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik akan lebih mudah digunakan oleh berbagai pihak.

D. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengamanan informasi pemerintah daerah.

Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD difasilitasi layanan persandian	46 OPD	46 OPD	310.900.000	299.132.439	96.22%
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD menggunakan layanan keamanan informasi	46 OPD	46 OPD	144.500.000	144.500.000	100% (sub-kegiatan)

Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD tergabung dalam forum pengamanan informasi	46 OPD	46 OPD	63.550.000	41.406.500	65.16%
Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah terhubung dalam jaringan komunikasi sandi	46 OPD	46 OPD	26.275.000	26.275.000	100% (sub-kegiatan)

Tabel 2: Realisasi Anggaran dan Capaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024

Sumber: LKjIP Diskominfo Kabupaten Semarang 2024

Sumber: LKjIP Diskominfo Kabupaten Semarang 2024

1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Target tahun 2024 adalah memfasilitasi layanan persandian untuk 46 OPD. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini mencapai 96,22% dari pagu indikatif Rp 310.900.000,00, dengan realisasi Rp 299.132.439,00. Sub-kegiatan "Penyediaan Layanan Keamanan dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota" berhasil mencapai 100% realisasi untuk target 46 OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi. Secara keseluruhan, kinerja program "Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi" pada tahun 2024 mencapai 100% target realisasi untuk indikator kinerja utamanya. Ini termasuk "Persentase konten informasi

pemerintah daerah yang diamankan" yang mencapai 100% (50 dari 50 konten informasi diamankan, meliputi 46 sistem aplikasi dan 4 jenis informasi), serta "Persentase keamanan informasi sesuai peraturan yang berlaku" yang juga mencapai 100% (46 dari 46 item informasi diamankan). Pencapaian 100% dalam pengamanan konten informasi pemerintah dan kepatuhan terhadap regulasi keamanan merupakan keberhasilan yang sangat penting. Hal ini secara langsung mengatasi semakin pentingnya keamanan siber dalam pelayanan publik, melindungi data warga, dan menjaga kepercayaan terhadap sistem e-government. Realisasi anggaran yang tinggi semakin mendukung komitmen terhadap area vital ini.

2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Target tahun 2024 adalah memfasilitasi layanan keamanan informasi untuk 46 unit perangkat daerah. Program ini berhasil mencapai 100% realisasi untuk target 46 OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi. Pencapaian 100% dalam penyediaan layanan keamanan informasi kepada 46 OPD menunjukkan adopsi dan dukungan yang luas terhadap langkah-langkah keamanan di seluruh pemerintahan daerah. Pendekatan proaktif terhadap keamanan ini sangat penting untuk membangun infrastruktur digital yang tangguh.

3. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Target tahun 2024 adalah agar 46 OPD tergabung dalam forum pengamanan informasi. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini mencapai 65,16% dari pagu indikatif Rp 63.550.000,00, dengan realisasi Rp 41.406.500,00. Persentase realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan program lain mungkin mengindikasikan adanya tantangan

dalam koordinasi antar-lembaga atau peluncuran inisiatif ini yang lebih lambat dari perkiraan. Meskipun targetnya adalah 46 OPD tergabung dalam forum, realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% menunjukkan adanya kendala potensial dalam mencapai sepenuhnya tujuan ini. Hal ini dapat menjadi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan kolaborasi keamanan yang lebih erat antar-OPD.

4. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah

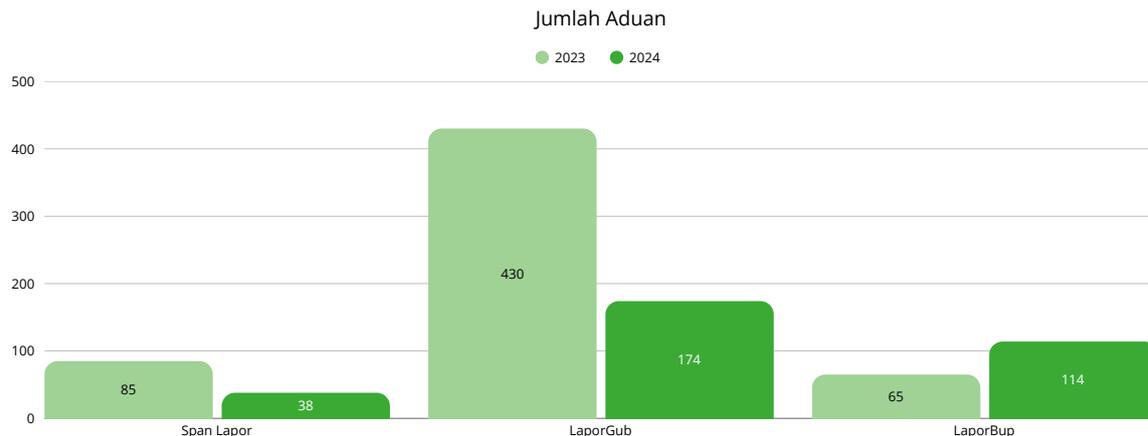
Target tahun 2024 adalah agar 46 unit perangkat daerah terhubung dalam jaring komunikasi sandi. Program ini berhasil mencapai 100% realisasi untuk target 46 OPD yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi. Pencapaian 100% dalam operasionalisasi jaringan komunikasi sandi merupakan indikator kuat keberhasilan implementasi teknis. Hal ini memastikan saluran komunikasi yang aman dan rahasia di seluruh unit pemerintah, yang sangat penting untuk pertukaran informasi sensitif dan tata kelola yang terkoordinasi. Jaringan ini menjadi tulang punggung teknis yang krusial untuk operasional pemerintah yang aman, memungkinkan pertukaran informasi rahasia dan mengurangi kerentanan, sehingga meningkatkan integritas pelayanan publik secara keseluruhan.

Mekanisme Umpan Balik dan Pengaduan Publik

A. Saluran Pengaduan yang Tersedia (Lapor Bupati, SP4N-LAPOR!, Inspektorat)

Diskominfo Kabupaten Semarang secara aktif mengelola kanal pengaduan sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo 2021-2026 menyebutkan target pengelolaan 3 kanal pengaduan. Keberadaan berbagai saluran yang jelas ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap partisipasi publik dan akuntabilitas.

Tahun	Span-Lapor	LaporGub	LaporBup	Total
2023	85	430	65	580
2024	38	174	114	326



1. Lapor Bupati

Ini adalah salah satu kanal aspirasi dan pengaduan *online* rakyat yang didukung oleh Diskominfo Kabupaten Semarang. Mekanisme pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk Lapor Bupati, melibatkan tahapan penerimaan, verifikasi, tanggapan awal, distribusi, dan tindak lanjut. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui formulir *online* yang tersedia di situs Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang atau melalui portal "Lapor Bupati" di situs utama Kabupaten Semarang. Laporan yang masuk melalui Lapor Bupati akan diproses oleh

operator Lapor Bupati setelah disetujui oleh administrator, dan dapat mencakup beragam isu seperti kendala pasokan air atau pertanyaan terkait seleksi PPPK.

2. SP4N-LAPOR!

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) adalah aplikasi pengaduan resmi nasional yang terhubung dengan ratusan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Meskipun salah satu sumber informasi merujuk pada Kabupaten Ngada, LKjIP Diskominfo Kabupaten Semarang 2024 secara eksplisit mencatat bahwa 41 aduan dari SP4N Lapor telah ditangani oleh Diskominfo Kabupaten Semarang. Hal ini menegaskan bahwa SP4N-LAPOR! merupakan salah satu kanal aktif yang digunakan di Kabupaten Semarang. Tujuan utama SP4N-LAPOR! adalah memungkinkan penyelenggara untuk mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik.

3. Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang

Inspektorat menyediakan formulir pengaduan online yang dirancang untuk menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Formulir ini secara spesifik meminta detail informasi mengenai perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau pelanggaran, termasuk detail mengenai APA (perbuatan), WHO (pihak terlibat), WHERE (lokasi), WHEN (waktu), CARA (modus), dan BUKTI (jika ada). Fokus pada kerahasiaan pelapor melalui kanal Inspektorat ini sangat penting untuk mendorong masyarakat melaporkan pelanggaran tanpa rasa khawatir.

Keberadaan berbagai kanal pengaduan yang terdefinisi dengan jelas dan disebutkan secara eksplisit peran Diskominfo dalam pengelolaannya menunjukkan komitmen yang kuat terhadap partisipasi publik dan akuntabilitas. Fakta bahwa 352 pengaduan telah ditangani pada tahun 2024, termasuk melalui Lapor Bupati dan SP4N-LAPOR, membuktikan bahwa mekanisme ini tidak hanya bersifat simbolis tetapi secara aktif dimanfaatkan oleh masyarakat dan diproses secara efektif oleh pemerintah. Ini mengindikasikan adanya lingkaran umpan balik yang matang dan terintegrasi dalam penyediaan pelayanan publik.

B. Proses Penanganan Pengaduan

Mekanisme pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang mengikuti tahapan yang terstandarisasi untuk memastikan penanganan yang sistematis dan efektif. Proses ini terdiri dari lima tahapan utama: penerimaan, verifikasi, tanggapan awal, distribusi, dan tindak lanjut.

Pada tahap **penerimaan**, pengaduan diterima dan dicatat oleh Petugas Pelayanan Pengaduan yang ditunjuk oleh Pejabat Pengelola Pengaduan. Petugas ini bertanggung jawab untuk memastikan setiap aduan tercatat dengan baik. Setelah itu, pengaduan akan melalui proses **verifikasi** untuk memastikan kelengkapan dan validitas informasi. Tahap selanjutnya adalah pemberian **tanggapan awal**, di mana pelapor akan menerima konfirmasi bahwa laporan mereka telah diterima dan sedang diproses. Kemudian, pengaduan akan di **distribusikan** kepada unit atau OPD terkait yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menangani masalah yang dilaporkan. Misalnya, laporan yang disampaikan melalui "Lapor Bupati" akan muncul di halaman setelah disetujui oleh administrator, dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh operator Lapor Bupati.

Tahap terakhir adalah **tindak lanjut**, di mana OPD terkait akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan. Penting untuk dicatat bahwa pemerintah menjamin kerahasiaan laporan dan identitas pelapor melalui aplikasi seperti SP4N-LAPOR! dan formulir Inspektorat. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan ini sangat krusial untuk mendorong partisipasi publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengaduan. Proses yang jelas dan terstandarisasi ini memastikan konsistensi dan akuntabilitas dalam penanganan umpan balik publik, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap responsivitas pemerintah.

Tantangan dan Rekomendasi

A. Tantangan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik

Pelaksanaan pelayanan publik oleh Diskominfo Kabupaten Semarang pada tahun 2024 menghadapi beberapa tantangan signifikan yang memerlukan perhatian strategis untuk perbaikan di masa depan.

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu isu yang berulang di berbagai program adalah kesenjangan kapasitas sumber daya manusia. Terdapat kekurangan "JFT Statistisi" (Fungsional Statistisi) atau SDM yang kompeten di bidang statistik, yang menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal karena tidak adanya personel dengan pendidikan dasar statistik. Demikian pula, terdapat kekurangan "JFT Surveyor Pemetaan" (Fungsional Surveyor Pemetaan) untuk pengelolaan data spasial, sesuai arahan dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Di bidang persandian, pemenuhan SDM yang menangani persandian masih terbatas dan banyak yang belum memiliki kemampuan khusus di bidang teknologi informasi dan persandian. Hal ini berdampak pada implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang belum optimal karena ketiadaan jabatan fungsional Manggala Informatika. Keterbatasan SDM spesialis ini merupakan hambatan sistemik yang dapat menghambat pencapaian penuh tujuan transformasi digital dan keberlanjutan kualitas layanan publik digital. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk perencanaan tenaga kerja strategis dan pengembangan talenta di bidang-bidang teknis kunci.

2. Infrastruktur dan Fasilitas

Kesenjangan infrastruktur juga menjadi tantangan yang nyata. Infrastruktur jaringan komunikasi belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Semarang, menyebabkan adanya area blankspot yang membatasi akses masyarakat terhadap layanan digital. Selain itu, fasilitas pendukung seperti komputer dan printer masih belum memadai untuk mendukung operasional yang optimal. Tantangan lain adalah kurangnya penyimpanan cloud yang tersedia untuk penyimpanan data online. Keterbatasan infrastruktur ini secara langsung memengaruhi jangkauan dan keandalan layanan publik digital, terutama di daerah pedesaan, serta

berdampak pada efisiensi dan keamanan manajemen data internal. Ini menunjukkan bahwa meskipun Diskominfo memiliki tujuan digital yang ambisius, fondasi fisik dan digital masih membutuhkan investasi berkelanjutan untuk mencapai penyediaan layanan yang universal dan kuat.

3. Tata Kelola dan Koordinasi

Tantangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga organisasional dan tata kelola. Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih belum berfungsi secara optimal karena belum mendapat dukungan sepenuhnya dari PPID Pembantu di Perangkat Daerah lain. Ini menghambat keterbukaan informasi yang lebih luas. Selain itu, penyelenggaraan statistik sektoral yang terintegrasi melalui sistem aplikasi belum optimal, sehingga sistem satu data kabupaten belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Elemen dalam Penyelenggara Infrastruktur Data Spasial (SDI) juga belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, peran lintas sektor dalam mengatasi permasalahan bidang komunikasi dan informatika belum mendapat dukungan yang optimal. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa solusi teknologi saja tidak cukup; tata kelola digital yang efektif memerlukan kolaborasi yang kuat dan pemahaman bersama di seluruh unit pemerintahan. Ini menyoroti perlunya penguatan kelembagaan dan manajemen perubahan di luar implementasi teknologi informasi.

B. Rekomendasi untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan di Masa Depan

Berdasarkan tantangan yang teridentifikasi, berikut adalah rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Diskominfo Kabupaten Semarang di masa mendatang:

1. Penguatan Kapasitas SDM

- **Mendorong Pengadaan SDM Spesialis**

Mendesak pengadaan "JFT Statistisi" dan "JFT Surveyor Pemetaan" untuk mengisi kekosongan SDM yang kompeten di bidang statistik dan data spasial.

- **Peningkatan Kompetensi Persandian dan Informatika**

Mengupayakan pemenuhan SDM persandian yang memiliki kemampuan khusus di bidang IT dan persandian. Mengusulkan pembentukan jabatan fungsional Manggala Informatika untuk optimalisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

- **Pelatihan dan Sertifikasi Berkelanjutan**

Mengadakan program pelatihan dan sertifikasi secara berkala untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang komunikasi digital, statistik, dan keamanan informasi. Ini akan memastikan bahwa personel memiliki keterampilan terkini untuk menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang.

2. Peningkatan Infrastruktur Digital

- **Perluasan Jaringan Komunikasi**

Melanjutkan upaya perluasan jangkauan jaringan komunikasi ke wilayah blankspot untuk memastikan akses internet yang merata di seluruh Kabupaten Semarang.

- **Pengadaan Fasilitas Memadai**

Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengadaan fasilitas komputer, printer, dan solusi penyimpanan cloud yang memadai. Ini akan meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas penyimpanan data.

- **Keandalan Pusat Data**

Memastikan keandalan dan keamanan pusat data pemerintah daerah melalui simulasi Disaster Recovery Planning (DRP) dan pemeliharaan rutin yang konsisten. Hal ini dapat belajar dari praktik terbaik yang dilakukan di tingkat provinsi.

3. Peningkatan Tata Kelola dan Kolaborasi

- **Optimalisasi Fungsi PPID**

Memperkuat koordinasi dengan PPID Pembantu di seluruh Perangkat Daerah untuk memastikan optimalisasi fungsi PPID dan mendorong keterbukaan informasi yang lebih efektif.

- **Peningkatan Kualitas dan Koordinasi Data**

Meningkatkan komitmen dari setiap OPD untuk menyediakan data yang sesuai standar data. Selain itu, meningkatkan koordinasi dengan seluruh penyelenggara Infrastruktur Data Spasial (SDI) untuk pemenuhan kebutuhan data sesuai jadwal.

- **Sinergi Lintas Sektor**

Mendorong sinergi lintas sektor untuk mendukung program komunikasi dan informatika, termasuk dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama.

- **Forum Keamanan Informasi**

Memanfaatkan forum pengamanan informasi yang sudah ada untuk meningkatkan kesadaran dan praktik keamanan informasi di seluruh OPD.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Saluran Pengaduan

- **Promosi Kanal Pengaduan**

Terus mempromosikan kanal-kanal pengaduan yang tersedia seperti "Lapor Bupati" dan SP4N-LAPOR! kepada masyarakat secara lebih masif untuk mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan kesadaran publik akan saluran ini.

- **Proses Tindak Lanjut yang Efisien**

Memastikan proses tindak lanjut pengaduan berjalan cepat, tepat, dan transparan, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengaduan dan mendorong lebih banyak laporan yang konstruktif.

Penutup

Laporan Tahunan ini menyimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang telah menunjukkan komitmen dan capaian signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sepanjang tahun 2024. Khususnya, program penyelenggaraan statistik sektoral dan persandian untuk pengamanan informasi menunjukkan realisasi target kinerja yang tinggi, mencerminkan dedikasi Dinas dalam menyediakan data yang akurat dan menjaga keamanan informasi pemerintah. Capaian ini merupakan fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Meskipun demikian, beberapa tantangan struktural dan operasional masih menjadi area yang memerlukan perhatian serius untuk peningkatan di masa mendatang. Tantangan-tantangan ini meliputi kesenjangan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknis, keterbatasan infrastruktur digital, serta kebutuhan akan peningkatan tata kelola dan koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah. Tantangan-tantangan ini, jika tidak diatasi, dapat menghambat laju transformasi digital dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Dengan terus mengimplementasikan rekomendasi yang telah disusun, yang mencakup penguatan kapasitas SDM, peningkatan infrastruktur digital, perbaikan tata kelola dan kolaborasi, serta optimalisasi pemanfaatan saluran pengaduan, Diskominfo Kabupaten Semarang optimis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya berkelanjutan ini akan berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berbasis digital, demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang.